



Religious and sustainability: Studi integrasi antara pentakostalisme, populisme, dan politik

Pontus Sitorus¹ , Jonias Pasaribu²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Amsal, Medan

Correspondence:

sitorus.pontus@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i1.487>

Article History

Submitted: Jan. 23, 2022

Reviewed: March 28, 2024

Accepted: April 18, 2024

Keywords:

pentecostal;
pentecostalism;
populism;
pentecostal politic;
sustainable development goals (SDGs);
pentakostal;
pentakostalisme;
populisme;
politik pentakostal

Copyright: ©2024, Authors.

License:



Abstract: As part of the world community, Pentecostals must consider their role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This role must be carried out in various aspects, including socio-political with a populism approach to unify the identity of Pentecostalism. This research integrates Pentecostalism, politics, and populism to achieve sustainable development. The research method used is descriptive qualitative with a constructive theological approach. The research results show that Pentecostalism populism in politics has a cheerful face in efforts to achieve sustainability. The universalism of the Sustainable Development Goals (SDGs) must be combined with a more internal view and involve the Pentecostal community in the struggle for hegemony over the concept of sustainable development. Populism, which often mobilizes support through emotional issues and religious identity, can be integrated with sustainability strategies through religious communities providing spiritual and moral support. Integration between Pentecostalism, populism, and politics to achieve effective and inclusive sustainable development while recognizing the challenges and need for adaptation in the face of global social, political, and economic change.

Abstrak: Pentakostal sebagai bagian dalam masyarakat dunia ditantang untuk memikirkan peranannya dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Peranan tersebut mesti dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk sosial-politik dengan pendekatan populisme sebagai sarana pemersatu identitas Pentakostalisme. Tujuan penelitian ini adalah mengintegrasikan antara Pentakostalisme, politik, dan populis sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologi konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme Pentakostalisme dalam politik berwajah positif dalam upaya mencapai sustainability. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB harus dipadukan dengan pandangan yang lebih internal dan melibatkan komunitas Pentakostal dalam perjuangan mendukung dan menolak hegemoni atas konsep pembangunan berkelanjutan. Populisme, yang seringkali memobilisasi dukungan melalui isu-isu emosional dan identitas religius, dapat diintegrasikan dengan strategi keberlanjutan melalui komunitas agama yang menyediakan dukungan spiritual dan moral. Integrasi Pentakostalisme, populisme, dan politik sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang efektif dan inklusif, sambil mengakui tantangan dan kebutuhan adaptasi dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi global.

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyajikan kerangka kerja utama untuk kebijakan pembangunan di seluruh dunia yang diadopsi dari United Nations Sustainable Development Summit pada bulan September 2015. SDGs terdiri dari tujuh belas tujuan dengan 169 target. Tujuan utama dari SDGs adalah untuk mempromosikan kemakmuran bagi semua orang sambil melindungi dunia. SDGs berusaha untuk memastikan bahwa semua negara dan semua orang, terlepas dari status mereka, dapat berkontribusi dan menikmati pembangunan yang berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, melindungi sumber daya alam, mempromosikan kesetaraan gender, dan membangun masyarakat yang adil dan damai.¹ SDGs melanjutkan, dan secara ambisius memperluas, delapan kerangka pembangunan sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals (MDGs).² Perbedaan utama antara SDGs dan MDGs. MDGs hanya berlaku pada negara berkembang, sedangkan SDGs akan berlaku secara universal ke seluruh negara anggota PBB. Berbagai strategi diterapkan agar SDGs berhasil sepenuhnya, karenanya daerah perkotaan dan pemerintah—yang merupakan mayoritas implementasi dan pemantauan akan terjadi—kebutuhan untuk diberdayakan. Kerja sama yang terdesentralisasi dan tindakan yang terintegrasi secara vertikal, yang memanfaatkan dan memungkinkan kapasitas aktor pemerintah daerah, dapat membuat dampak positif terhadap keberhasilan SDGs. Oleh karena itu, politik, dalam arti kebijakan dan praksisnya, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita SDGs.

Dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh agama, khususnya gerakan Pentakostal, terhadap dinamika politik dan populisme telah meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia, khususnya di Dunia Selatan.³ Menurut Fontana dan Luber, pengaruh Pentakostalisme dalam ranah politik, terutama di wilayah seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia, sangat signifikan dan bervariasi. Secara kuantitatif, dampaknya dapat diamati melalui peningkatan jumlah pemimpin dan anggota komunitas Pentakostal yang berpartisipasi aktif dalam politik, baik sebagai pejabat terpilih maupun sebagai pendukung berpengaruh dari kebijakan dan kandidat tertentu.⁴ Secara kualitatif, gerakan Pentakostal sering mempromosikan seperangkat nilai dan prioritas yang khas, seperti tata kelola moral, tindakan anti-korupsi, dan kebijakan yang mencerminkan posisi teologis mereka terhadap isu sosial.

Keterlibatan politik Pentakostal sering kali didorong oleh apa yang dikenal sebagai "injil kemakmuran," yang menggabungkan kesejahteraan spiritual dan material, menyarankan bahwa iman dapat membawa peningkatan kekayaan dan kesehatan. Sistem kepercayaan ini dapat memobilisasi pemilih dan mempengaruhi kebijakan publik untuk mendukung kapitalisme pasar bebas, kewirausahaan individu, dan intervensi pemerintah yang terbatas dalam

¹ Michael Woodbridge, "From MDGs to SDGs: What Are the Sustainable Development Goals?," *ICLEI BRIEFING SHEET - Urban Issues* 1, no. 1 (2015): 4, <https://www.local2030.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-Development-Goals.pdf>.

² Terdapat delapan bidang yang menjadi focus dalam MDGs, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Lihat Woodbridge, 1.

³ Leandro L.B. Fontana and Markus Luber, eds., *Political Pentacostalism: Four Synoptic Survey from Asia, Africa, and America Latin* (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2021).

⁴ Leandro L.B. Fontana, "Introduction," in *Political Pentacostalism: Four Synoptic Survey from Asia, Africa, and America Latin*, ed. Leandro L.B. Fontana and Markus Luber (Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2021), 9–24.

kekayaan pribadi. Selain itu, Pentakostal sering menekankan nilai-nilai keluarga, yang dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap isu seperti aborsi, pernikahan, dan reformasi pendidikan. Secara keseluruhan, pengaruh Pentakostalisme dalam politik melampaui partisipasi pemilihan sederhana, mempengaruhi diskusi nasional tentang tata kelola, hukum, dan moralitas publik. Pengaruh ini merupakan cerminan dari pertumbuhan gerakan tersebut dan indikator potensinya untuk membentuk lanskap politik masa depan secara signifikan.

Gerakan Pentakostal, dikenal dengan kekhasan spiritualitas dan ekspresi agama yang cair (*liquid*), mulai memberikan perhatian pada aspek sosial-politik. Sementara itu, populisme sebagai gerakan politik yang mengartikulasikan *populum* rakyat dengan tokoh kharismatis juga mencuat. Populisme hadir dalam percaturan politik di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.⁵ Populisme sebagai gerakan politik mampu memantik sentimental dan membentuk kekuatan politik berbasis identitas dan kesamaan ideologi.⁶ Alih-alih memandangnya secara negatif, peneliti melihat populis dalam politik dapat dijadikan sebagai alat mencapai SDGs. Kajian Jörg Haustein dan Emma Tomalin berjudul "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals," mengeksplorasi bagaimana SDGs berpotensi berkonflik dengan visi sempit yang sering diadopsi oleh gerakan populis, yang semakin mendominasi politik global. Dalam kerangka teori populisme Laclau dan Mouffe, SDGs dipahami sebagai perjuangan hegemoni, di mana aktor-aktor religius muncul sebagai pemain kunci dalam membentuk konstituensi politik di belakang slogan-slogan pembangunan. Penelitian Haustein dan Tomalin menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor agama dalam implementasi SDGs untuk memastikan 'demokrasi radikal' dalam pembangunan berkelanjutan.⁷ Ruang terbuka ini memanggil umat Pentakostal meredefinisi keberhasilan misinya dalam kaitannya dengan politik yang membawa pada Pembangunan berkelanjutan (*Sustainability*).

Pada dasarnya, misi Pentakostal banyak menasar pada transformasi pribadi dan menggemakan slogan "berapapun harganya, kita harus menyelamatkan jiwa". Tak ayal, jumlah dari pribadi yang ditransformasi menjadi target utama.⁸ Allan H. Anderson menyebut semangat ini sebagai multidimensional kebangkitan misi Pentakostal dunia. Anderson menelusuri mulai dari Konferensi Misi Edinburgh tahun 1910, meskipun dari sudut pandang Pentakostalisme hal ini tidak begitu relevan, karena kaum Pentakostal tidak terwakili dalam konferensi tersebut. Namun, Anderson menyatakan bahwa hal itu dicatat oleh Pentakostal global sebagai fokus yang berkembang dalam misi oleh gereja-gereja Injili.⁹

⁵ Feridus Welak memandang populis sebagai agenda negative yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia mengusulkan Pancasila sebagai landasan politik yang tepat bagi Indonesia. Namun demikian, kajian Welak menunjukkan populis sebagai bagian hidup berpolitik yang tren dewasa ini. Selengkapnya, lihat Feridus Welak, "Populisme di Indonesia: Ancaman bagi Integritas Masyarakat dan Reaktualisasi Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 62–70.

⁶ Robertus Wijanarko, "Religious Populism and Public Sphere in Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 2021, 3.

⁷ Jörg Haustein and Emma Tomalin, "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals," *Social Policy and Society* 20, no. 2 (2021): 296–309, <https://doi.org/10.1017/S147474642000072X>.

⁸ Anggi Maringan Hasiholan, "Misi Yang Ramah dan Estetis: Rekonstruksi Misiologi Pentakostal Melalui Perspektif Hospitalitas Dan Teopoetik," *Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 882–98, <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1109>.

⁹ Allan Heaton Anderson, "Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development," *Spiritus* 5, no. 1 (2020): 121–36.

Sejak tahun 1916, misi Pentakostal mulai berkembang pesat dengan mengirim misionaris ke seluruh penjuru dunia untuk transformasi individu-individu.¹⁰ Veli-Matti Kärkkäinen mengafirmasi pemahaman ini, dan memang pada hakikatnya, Pentakostalisme adalah gerakan misionaris di mana umat Kristiani berada di bawah pengaruh segar dari Roh Kudus untuk pergi membagikan pesan dan pengalaman dengan Roh Kudus ke seluruh dunia.¹¹ Meskipun demikian, tidak jarang pula transformasi pribadi membawa perpindahan ke tangga sosial (dan politik) yang lebih tinggi. Memang tujuan dari pertobatan bukan sesuatu yang terkait masalah finansial dan politik, namun berkat finansial kerap kali mengikuti perubahan kehidupan seorang kepala keluarga.¹² Miller dan Yamamori menulis bahwa:

There is a clear connection between upward social mobility and living a disciplined, honest life. As individuals give up squandering time and money, the opportunity for economic advancement is enhanced. It is important to note, however, that the goal of conversion is not financial; rather, financial gain is an unintended consequence of a changed life. As individuals become more disciplined in their spiritual lives, they establish patterns that contribute to their work life and business activities.¹³

Perlu dicatat pula, bahwa etika baru ini tidak muncul dari dunia antah-berantah (kevakuman).¹⁴ Etika baru tersebut muncul dari dan berada dalam sebuah “budaya” yang menyediakan *spiritual support*, mulai dari pelepasan terhadap kuasa-kuasa demonik, ibadah yang *powerful*, hingga doa-doa syafaat yang intens, *social support* atau pendampingan pastoral yang intensif, dan tidak jarang pula *political support*.

Merespons keadaan di atas, maka menganalisis dinamika interaksi antara gerakan Pentakostal, populisme, dan politik dalam konteks keberlanjutan dan mengeksplorasi strategi dan praktik yang dapat diterapkan untuk memperkuat kontribusi positif agama, khususnya Pentakostal, dalam mendukung keberlanjutan politik (dan sosial-ekonomi). Upaya yang sama pernah dilakukan oleh Allan H. Anderson yang mengkaji bagaimana teologi sosial Pentakostalisme menyentuh isu politik dan ekonomi. Menurut Anderson, sebenarnya kaum Pentakostal di banyak belahan dunia tidak memisahkan diri secara keterlibatan sosial-politik dari penginjilan. Pentakostal terlibat dengan masyarakat karena perpindahan agama dan pembebasan yang dihasilkan oleh pengalaman dan pemberdayaan oleh Roh Kudus.¹⁵ Jörg Haustein dan Emma Tomalin menulis penelitiannya dalam kerangka tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) sebagai kerangka politik. Kajian mereka berada dalam ketegangan dengan aspirasi universal dan multilateralnya yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap visi populis sempit yang semakin mendominasi politik global. Penelitian mereka dibangun dengan teori populisme Laclau dan Mouffe dan gagasan mereka tentang ‘demokrasi radikal’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengkonseptualisasikan SDGs sebagai perjuangan untuk hegemoni dan bersaing dengan gaya lain politik, mengenai apa yang dianggap sebagai

¹⁰ Allan Heaton Anderson, “The Emergence of a Multidimensional Global Missionary Movement: A Historical Review,” in *Pentecostal Mission and Global Christianity*, ed. Wonsuk Ma, Veli-Matti Kärkkäinen, and J. Kwabena Asamoah-Gyadu (Oxford: Regnum Books International, 2014), 10–25.

¹¹ Veli-Matti Kärkkäinen, “The Pentecostal Understanding of Mission,” in *Pentecostal Mission and Global Christianity*, ed. Wonsuk Ma, Veli-Matti Kärkkäinen, and J. Kwabena Asamoah-Gyadu (Oxford: Regnum Books International, 2014), 26–44.

¹² Anggi Maringan Hasiholan, “Spiritualitas Dan Teologi Sosial Pentakostal Asia,” *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–77.

¹³ (Miller and Yamamori 2016, 168–9)

¹⁴ Miller and Yamamori, 169.

¹⁵ Anderson, “Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development,” 124.

'pembangunan' merupakan tugas agama.¹⁶ Dari dua penelitian ini, belum ada yang mengkaji peranan Pentakostalisme dalam konteks politik dan populisme untuk pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini berargumen bahwa integrasi antara gerakan Pentakostal, populisme, dan politik memiliki potensi yang signifikan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun sering kali dilihat sebagai entitas yang bertentangan, gerakan agama seperti Pentakostal dan fenomena populisme politik dapat, dalam kondisi tertentu, membentuk sinergi yang mempromosikan keberlanjutan sosial-ekonomi, sosial-politik, dan lingkungan. Melalui analisis mendalam, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika kompleks di balik interaksi ini dan mengeksplorasi bagaimana sinergi positif dapat ditingkatkan untuk mendukung agenda keberlanjutan global.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologi konstruktif yang menggabungkan beberapa tema, di antaranya populisme, politik, dan Pentakostalisme, untuk mengkaji teori dan praksis dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, peneliti mengkaji landasan teologi dan praksis sosial-politik Pentakostal sebagai wacana bagi keterlibatan umat Pentakostal bagi Pembangunan Berkelanjutan. Bagian kedua, peneliti mengkaji populisme dan politik dari perspektif positif yang dapat dijadikan sebagai sarana pemersatu identitas Pentakostalisme untuk terlibat dalam politik dan pembangunan berkelanjutan. Bagian ketiga, konstruksi peneliti berdasarkan integrasi antara Pentakostalisme, politik, dan populisme untuk mencapai cita-cita Pembangunan berkelanjutan.

Landasan Teologi dan Ruang Terbuka Aspek Sosial-Politik Pentakostal

Hendarto Supatra melukiskan berbagai ciri khas teologi dan spiritualitas Pentakostal di Indonesia yang menjadikan dasar bertindak dalam segala aspek di dunia, termasuk sosial-politik. Pertama, bergantung pada Roh Kudus. Pentakostalisme di Indonesia menekankan ketergantungan pada pekerjaan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan gerejawi. Kedua, pemberitaan Injil Sepenuh. Ajaran dan praktik Pentakostal meliputi keselamatan, penyembuhan, dan demonstrasi kuasa Roh Kudus melalui tanda-tanda, mujizat, dan karunia-karunia rohani. Ketiga, Pneumatologi (Doktrin Roh Kudus). Pentakostalisme memberi penekanan khusus pada peran dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan percaya, membedakannya dari tradisi Katolik yang lebih eklesiologis dan Protestan yang lebih Kristologis. Keempat, kebaktian yang penuh gairah. Ciri kebaktian Pentakostal melibatkan partisipasi aktif jemaat dengan pujian dan penyembahan yang meriah dan menciptakan suasana "total worship".¹⁷

Dari berbagai spiritualitas Pentakostalisme, ada beberapa bahaya yang mengikutinya. Pertama, doktrin Pentakostal di Indonesia mengakui Alkitab sebagai sumber otoritas utama bahkan punya semboyan "with no creed but Bible"¹⁸, namun terkadang pendekatan interpretasi yang sangat subjektif dan emosional bisa menyimpang dari pemahaman teologis yang lebih mendalam. Apalagi Smith mengatakan kaum Pentakostal dan/atau neo-pentakostal lebih cenderung merasa bahwa sumber otoritas tertulis, Alkitab, harus tunduk pada sumber

¹⁶ Haustein and Tomalin, "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals."

¹⁷ Hendarto Supatra, "Mengenal Pentakostalisme Di Indonesia," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja* 3, no. 2 (2019): 11–24, <https://doi.org/10.37368/ja.v3i2.97>.

¹⁸ David L Smith, *A Handbook of Contemporary Theology* (Michigan: Bridge Point Books, 1998), 50.

kuasa yang hidup, yaitu Roh Kudus.¹⁹ Fakta ini menjadi awas bagi Pentakostal agar mengkaji landasan teologi sosial-politik dengan benar.

Pentakostalisme awal mengakui berbagai jenis berkat, termasuk pertobatan, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Namun, ada kecenderungan mengabaikan aspek pertobatan dan pengudusan demi teologi kemakmuran.²⁰ Injil Kemakmuran atau Teologi Kemakmuran yang mendapat tempat. Pengajaran, perkataan, dan penerapan Injil Kemakmuran menjadi hal yang rutin dan penting dari operasional gereja Pentakostal-Karismatik. Ajaran ini menekankan pemberian persembahan persepuluhan secara teratur dan menabur benih di sebagian besar pertemuan gereja. Injil kemakmuran seperti landasan, "mesin", dan katalis yang membuat umat Pentakostal percaya akan adanya perubahan ekonomi. Injil Kemakmuran adalah keyakinan dan doktrin yang menganut bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan dan disukai umat Kristen. Dinyatakan bahwa orang beriman mempunyai hak atas berkat materi dengan cara menabur benih melalui pembelian persepuluhan dan persembahan lainnya dengan setia. Urquhart menyatakan bahwa Tuhan ingin agar anak-anak-Nya untuk menjadi makmur ketika mereka hidup berdasarkan prinsip-prinsip Kerajaan Surga dan menjalankan iman mereka kepada Tuhan.²¹ Memberi adalah rahasia menerima. Kebaikan yang melimpah akan dinikmati oleh orang yang mendisiplinkan dirinya, menjadi orang yang tegas, berani mengambil keputusan, mengejar keuntungan, percaya diri, berani mengambil resiko, dan bertekad dalam setiap hal.

Melihat dari spiritualitas di atas, maka kiprah dan teologi sosial-politik Pentakostal dapat dikatakan sesuatu yang baru dalam percakapan teologi Pentakostalisme. Bahkan menurut Minggu M. Pranoto teologi Pentakostal memandang realitas kuasa politik sebagai masalah etika spiritual, menolak pendekatan yang hanya mendasarkan analisis pada metode sosial akademis. Pengaruh kuasa-kuasa demonis dianggap relevan dalam kehidupan politik, memerlukan discernment spiritual untuk mengidentifikasi dan meresponsnya.²² Pentakostalisme yang selama ini berfokus dalam spiritualitas komunitas lokal, diajak "keluar" untuk menyentuh isu-isu sosial, termasuk politik yang nantinya dapat digunakan sebagai katalisator Pembangunan yang berkelanjutan. Fransiskus Irwan Widjaja dkk., menelusuri landasan sosial-politik Pentakostal dalam kerangka berpikir hospitalitas. Widjaja dkk mengungkapkan bahwa keterlibatan umat Pentakostal dalam kehidupan sosial di luar gereja merupakan penegasan bahwa gereja merasa harus terlibat dalam semua aspek kehidupan. Namun, partisipasi dalam domain sosial seringkali diartikulasikan dengan kegiatan misi gerejawi yang bertujuan untuk memenangkan jiwa dan menambah jumlah anggota gereja.²³

Widjaja dkk., mengajukan kerangka refleksi teologis tentang hospitalitas dalam perspektif Pentakostal sebagai spiritualitas yang mendorong filosofi partisipatif kaum Pentakostal dalam ruang publik, baik secara sosial maupun politik. Konsep hospitalitas diartikan sebagai "mengasahi orang asing sebagai sahabat" atau "menyahabati orang asing", menekankan tindakan menyambut atau mengunjungi tanpa mengharapkan timbal balik, dan dianggap seba-

¹⁹ Smith, 128.

²⁰ Supatra, "Mengenal Pentakostalisme Di Indonesia."

²¹ B Idahosa, *I Choose to Change* (Crowborough: Highland, 1987).

²² Minggu M Pranoto, "Discerning the Spirit (s) Dalam Kuasa Politik: Sebuah Perspektif Teologi Pentakostal," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 3, no. 1 (2019): 1-16.

²³ Fransiskus Irwan Widjaja, Harls Evan R. Siahaan, and Nathanael Octavianus, "Partisipasi Sosial-Politik Sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 378-96, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.633>.

gai praktik yang diperlukan dalam komunitas iman, bukan hanya sebagai opsi atau karunia tertentu. Refleksi ini didasarkan pada pemahaman bahwa jemaat mula-mula melakukan hospitalitas ketika membuka ruang kebersamaan bagi "orang lain" yang bergabung setelah menjadi percaya, dengan Roh Kudus sebagai pendorong sikap hospitalitas ini.

Keinginan untuk terlibat dalam sosial-politik maka gereja (Pentakostal) hadir sebagai katalisator atau dinamisator kehidupan yang lebih humanis, yang berelasi dengan politik bukan hanya untuk berpolitik tetapi untuk menciptakan kehidupan yang mengusung tinggi nilai-nilainya. Dalam konteks ini, gereja dapat mengambil peran atau partisipasi dalam edukasi umat untuk terlibat dalam praktik politik yang lebih bermartabat, mengatasi stigma negatif terkait dengan gereja yang berpolitik, dan meningkatkan partisipasi sosial-politik sebagai praktik hospitalitas dalam perspektif Pentakostal.²⁴ Keterlibatan gereja, khususnya komunitas Pentakostal, dalam kehidupan sosial-politik menjadi landasan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang digagas PBB. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diimplikasikan sebagai dasar untuk kiprah umat Pentakostal dalam aspek sosial-politik berdasarkan refleksi dan prinsip spiritualitas Pentakostalisme.

Pertama, hospitalitas sebagai praktik sosial. Sikap hospitalitas gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul harus menjadi model bagi umat Pentakostal untuk terlibat dalam masyarakat. Praktik ini mencakup kepedulian sosial dan kesetiakawanan, mendorong gereja untuk terbuka dan melayani tidak hanya anggota gerejanya tetapi juga masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan kiprah sosial-politik, maka kaum marginal (yang diperjuangkan haknya) menerima keramah-tamahan Tuhan melalui umat Pentakostal dengan menggunakan kuasa Roh Kudus. Komunitas Pentakostal menunjukkan kemurahan hati dalam berbagi diri dalam komunitas gereja dan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari penyambutan Tuhan dalam menghasilkan buah Roh (Gal.5.22-23). Produk buah Roh Kudus ini dikaitkan dengan kepentingan orang lain dan orang yang berbeda, sebagai tindakan penyerahan diri seperti Kristus.²⁵

Kedua, edukasi dan keterlibatan politik. Paul Freteon mengatakan bahwa kaum Pentakostal seringkali tidak mampu mengembangkan sikap yang lebih universalis dan reflektif terhadap kehidupan publik, termasuk sosial-politik.²⁶ Oleh karena itu, mendorong pendidikan politik di kalangan umat Pentakostal agar mereka dapat berpartisipasi secara bermartabat dalam kehidupan politik adalah solusinya. Ini bisa mencakup kegiatan seperti pemilihan umum, diskusi publik mengenai isu-isu politik, hingga keterlibatan langsung dalam politik sebagai calon atau pendukung calon.

Ketiga, aksi sosial dan keadilan. Umat Pentakostal harus aktif dalam isu-isu sosial dan keadilan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan lingkungan hidup. Mereka diharapkan untuk menjadi suara bagi yang tidak berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Paul Freston dalam artikelnya yang berjudul "Pentecostalism and Global Politics: Three Questionable Approaches" mengeksplorasi hubungan antara Pentakostalisme dan politik global dan menyoroti bagaimana edukasi dan pemahaman politik dalam komunitas Pentakostal berkembang melalui tiga pendekatan yang sering ditemukan dalam literatur akademik dan komentar media. Pertama, Pentakostalisme sebagai ekstensi "Soft

²⁴ Widjaja, Siahaan, and Octavianus.

²⁵ Gernaída Krisna R. Pakpahan, "Pentecostal Spiritual Formation: The Passion of Social for Humanity in Society 5.0 Era," in *Iconthe 2022* (Atlantis Press SARL, 2023), 147, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-160-9_17.

²⁶ Paul Freteon, "Pentecostals and Politics in Latin America," in *Pentecostalism and Politics*, 2006 yang dikutip oleh Natalia Vlas and Simona Sav, "Pentecostalism and Politics," *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 13, no. 37 (2014): 148–77.

Power" Amerika. Pendekatan pertama yang dibahas Freston adalah ide bahwa pertumbuhan protes rakyat, terutama oleh umat Pentakostal, di seluruh dunia merupakan ekstensi dan penguatan "soft power" Amerika Serikat. Pandangan ini menyatakan bahwa pertumbuhan Pentakostal di Dunia Selatan, Asia, Amerika Latin, dan Afrika, menciptakan pandangan dunia yang standar yang akan berfungsi sebagai semacam "kolom kelima" atau "kuda Troya" imperialisme, mengasosiasikan kepentingan Amerika dengan kehendak Allah. Freston menyanggah pandangan ini dengan menunjukkan respons negatif dari Pentakostal di berbagai negara terhadap perang di Irak dan "perang melawan teror" yang dipimpin AS, menunjukkan adanya perbedaan sikap yang signifikan antara Pentakostal Amerika dengan Pentakostal di negara-negara Latin Amerika, Afrika, dan Asia.²⁷

Pendekatan kedua, Pentakostalisme dan Potensi Terorisme. Pendekatan kedua membandingkan Pentakostalisme dengan Islam radikal, menyiratkan bahwa kedua agama yang populer di kalangan miskin di berbagai wilayah dunia Selatan, Amerika Latin, Afrika, dan Asia, mungkin memiliki "potensi" terhadap terorisme. Freston menilai pandangan ini sebagai tidak mungkin, meskipun mengakui bahwa ada insiden kekerasan yang melibatkan Pentakostal di Nigeria, Indonesia, dan Republik Afrika Tengah. Survei Pew 2006 menunjukkan bahwa sikap Pentakostal terhadap kebebasan beragama sejalan dengan populasi umum di negara mereka, menunjukkan kurangnya dasar untuk perbandingan dengan Islam radikal.²⁸

Pendekatan ketiga, Pentakostalisme dan gelombang "Kristendom Baru". Pendekatan ketiga adalah gagasan bahwa Pentakostalisme akan mempromosikan gelombang "Kristendom baru" di Afrika dan Amerika Latin. Freston melihat lebih banyak dasar untuk pendekatan ini dibandingkan dengan dua yang sebelumnya, tetapi pada akhirnya menilainya sebagai sangat tidak mungkin karena perpecahan internal Pentakostalisme. Meskipun ada impian untuk mengkonversi atau memilih pemimpin yang berasal dari komunitas Pentakostal, kurangnya pemahaman tentang politik sebagai sistem dan harapan "mesianik" dalam presiden "evangelis" atau "terlahir baru" sering kali berakhir dengan oportunisme dan korupsi, seperti yang terlihat di Zambia.²⁹ Freston berargumen bahwa Pentakostalisme, meskipun sering dilihat sebagai potensial berbahaya bagi demokrasi, sebenarnya tidak sesuai dengan stereotip negatif tersebut ataupun dengan citra diri yang mereka idamkan sebagai pembawa berkat politik bagi negara mereka. Penyelidikan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pembangunan institusional yang berkelanjutan untuk membantu komunitas Pentakostal menjadi aktor politik yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Keempat, pelayanan komunitas. Melakukan pelayanan komunitas sebagai ekspresi kasih Allah, yang bisa mencakup pembangunan fasilitas sosial, program bantuan bagi yang membutuhkan, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung kesejahteraan umum. Umat Pentakostal yang dipenuhi Roh Kudus berjuang bagi keterlibatan sosial harus dalam kerangka pesan Injil. Keterlibatan sosial berkelindan dengan misi Amanat Agung.³⁰ Dengan kata lain, umat Pentakostal awal menjelek-jelekkan pelayanan yang menargetkan isu-isu sosial.³¹ Terdapat kasus tentang ketegangan ini. Misalnya, edisi awal *The Weekly Evangel* merayakan upaya

²⁷ Paul Freston, "Pentecostalism and Global Politics: Three Questionable Approaches," *Institute of Culture, Religion and World Affairs*, 2014, 1–4.

²⁸ Freston.

²⁹ Freston.

³⁰ Roger Haight, "The Mission of the Church in the Theology of the Social Gospel," *Theological Studies* 49, no. 3 (1988): 477–497.

³¹ Kent Duncan, "Emerging Engagement: The Growing Social Conscience of Pentecostalism," *Encounter: Journal for Pentecostal Ministry* 7 (2010).

pelayanan di sebuah panti asuhan di China dan pembukaan sekolah di Amerika Selatan. Tetapi, empat tahun kemudian dalam periode yang sama (sekarang telah berganti nama menjadi *Pentecostal Evangel*), J. Roswell Flower menyatakan bahwa usaha institusional, seperti pelayanan ke panti asuhan dan pembangunan sekolah, “jelas di luar batas untuk misionaris Pentakostal yang melayani di akhir zaman”. Lebih lanjut Flower menandakan misionaris Pentakostal tidak dapat mengikuti metode yang ditetapkan oleh mereka yang telah melakukan pelayanan sosial. Pentakostal tidak akan mengerahkan tenaganya untuk membangun panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah seperti halnya gereja Katolik, Pentakostal terpenggil untuk bersaksi.³²

Kelima, dialog dan kerja sama lintas iman. Berpartisipasi dalam dialog antaragama dan kerja sama lintas iman untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi dalam masyarakat yang plural. Ini bisa mencakup kegiatan bersama dengan komunitas agama lain dalam proyek sosial atau acara dialog. Keenam, Advokasi. Terlibat dalam advokasi untuk hak-hak sipil, kebebasan beragama, dan isu-isu etis lainnya. Ini dapat mencakup kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, mengorganisir kampanye, atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Populisme dan Politik sebagai Peluang

Populisme menjadi perbincangan hangat karena identitas agama yang menjadi pertaruhan-nya. Di Indonesia, populisme yang berafiliasi dengan politik identitas atas nama agama menjadi ancaman bagi integritas masyarakat yang dapat mengarah kepada perpecahan. Gejala eksklusif berdasarkan identitas agama menguak dengan tendensi mengabaikan keberadaan dan kehadiran individu dan kelompok di luar golongannya.³³ Populisme di Indonesia berdasarkan politik identitas memanas pada tahun 2017 saat pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta. Manuver, jika bisa dikatakan strategi politik, Anis Rasyid Baswedan dengan populisme politik berbasis identitas agama mampu mengantarkan dirinya memenangkan kontestasi Pilkada Gubernur DKI. Dua tahun kemudian, pada pemilihan umum Presiden tahun 2019, populisme politik berbasis agama hadir dengan manuver Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berafiliasi dengan kelompok politik sayap kanan Islam. Sektarian dari manuver politik kedua paslon tersebut sungguh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia.³⁴

Peneliti tentunya menolak populisme politik berbasis agama merusak kesatuan dan keragaman masyarakat Indonesia dan mencerminkan kemunduran demokrasi karena mengkristal sentimental sektarian.³⁵ Namun, alih-alih hanya menilai populisme politik dari perspektif negatif, peneliti melihat peluang populisme sebagai satuan kelompok yang dapat melaksanakan Pembangunan berkelanjutan. Pluralitas di Indonesia yang erat dengan saling mengakui dan menerima bukanlah halangan untuk populisme politik agama hadir. Apabila ditelusuri perasaan (*ortophaty*) mendasarinya, maka konsep ini mengafirmasi ke dalam batin kelompok tertentu untuk semangat dalam memperjuangkan suatu tujuan. Kehadirannya dalam perhelatan dan percaturan politik menarik semangat dan perasaan bersama individu-individu yang memiliki ideologi, nilai, dan spiritualitas yang sama. Hebertus Herianto dan Robertus Wijanarko menyatakan bahwa populisme politik berbasis agama hadir karena kekesalan

³² J. Roswell Flowe, “Pentecostal Commission,” *Pentecostal Evangel*, June 1920.

³³ Welak, “Populisme Di Indonesia: Ancaman Bagi Integritas Masyarakat Dan Reaktualisasi Pancasila.”

³⁴ Mathias Jebaru Adon, “Melawan Populisme Dengan Semangat Pancasila Sebagai Dasar Persatuan Dan Kesatuan Bangsa,” *Jurnal Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2021.

³⁵ Wijanarko, “Religious Populism and Public Sphere in Indonesia.”

terhadap masalah-masalah negara yang tidak pernah selesai, seperti korupsi, ketidakadilan dalam pendidikan, hukum, dan sosial, dan lain sebagainya.³⁶

Teori populisme Laclau dan Mouffe, yang memandang populisme tidak sebagai penyimpangan dari norma politik demokrasi liberal, melainkan sebagai fenomena politik yang mendasar perlu juga dijadikan ukuran populisme positif. Dalam teori Laclau dan Mouffe, populisme didefinisikan oleh cara-cara memobilisasi dukungan melalui pembentukan "rantai ekivalensi" di antara berbagai tuntutan sosial-politik yang berbeda, yang digabungkan di bawah satu "penanda kosong" atau "signifier" yang bersifat inklusif. Ini berarti populisme bisa menjadi alat yang menggabungkan berbagai tuntutan dan identitas dalam satu gerakan politik yang luas, seringkali dengan mengidentifikasi "musuh" bersama.³⁷ Konsep hegemoni sangat sentral dalam pemahaman Laclau dan Mouffe tentang populisme. Mereka berargumen bahwa politik, pada dasarnya, adalah tentang pembentukan hegemoni – proses memenangkan dukungan luas untuk visi tertentu tentang tatanan sosial. Dalam konteks SDGs dan populisme, ada pertarungan hegemoni antara kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan visi populis yang lebih sempit dan seringkali eksklusif.

Jean Comaroff dalam tulisannya yang berjudul "Pentecostalism, Populism, and the New Politics of Affect" mengkaji hubungan antara populisme dan politik Pentakostal dianalisis melalui lensa sosio-politik dan ontologis yang mendalam. Comaroff membahas bagaimana gerakan-gerakan Pentakostal, terutama di Afrika dan di seluruh dunia, berinteraksi dengan dan mempengaruhi lanskap politik kontemporer.³⁸ Menurut Comaroff, Pentakostalisme dapat berfungsi sebagai respons terhadap Neoliberalisme. Pentakostalisme tidak hanya merespons kondisi sosio-ekonomi-politik neoliberal tetapi juga, secara intrinsik dan dialektis, terlibat dalam transformasi global tersebut. Gerakan Pentakostal berupaya membangun otoritas suci yang baru dan mengesampingkan pemisahan antara sakral dan sekuler, mengintegrasikan aktivitas sekuler ke dalam domain religius. Ini mencerminkan dan memperkuat etos neoliberal melalui pemberdayaan wirausaha, perusahaan swasta, dan kader pemimpin politik dalam komunitas agama.³⁹

Menurut Comaroff, Pentakostalisme, populisme, dan ekspresi affective merupakan hubungan yang berkelindan. Pentakostalisme menonjolkan kebutuhan akan otoritas yang bersifat absolut dan penegasan kembali nilai-nilai tradisional dalam menghadapi ketidakpastian modern. Ini sering kali diwujudkan dalam bentuk populisme religius, di mana pemimpin karismatik menggunakan pesan dan praktik Pentakostal untuk menggalang dukungan massa.⁴⁰ Populisme Pentakostal ini terkadang menyuarakan aspirasi politik yang kuat dan bisa mengadvokasi perubahan sosial atau politik, meskipun dengan cara yang sangat berbeda dari sekularisme liberal tradisional.

Populisme Pentakostalisme didukung dengan perkembangan media dan teknologi. Pentakostalisme mengadopsi dan memanfaatkan media dan teknologi secara intensif, menggunakan mereka sebagai alat untuk menyebarkan pesan religius dan untuk membentuk komunitas iman yang luas. Ini mencerminkan karakteristik populisme kontemporer, di mana

³⁶ Hubertus Herianto and Robertus Wijanarko, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 53–64.

³⁷ E. Laclau and C. Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (London: Verso, 1987), 192.

³⁸ Jean Comaroff, *Pentecostalism, Populism and the Politics of Affect: In Africa and Elsewhere*, ed. Dena Freeman, *Pentecostalism and Development* (Palgrave Macmillan, 2012), <https://doi.org/10.1057/9781137017253>.

³⁹ Comaroff, 4–6.

⁴⁰ Comaroff, *Pentecostalism, Populism and the Politics of Affect: In Africa and Elsewhere*.

media sosial dan platform digital lainnya digunakan untuk mobilisasi dan diseminasi cepat ide. Meskipun Pentakostalisme memiliki visi untuk menyatukan kembali bidang-bidang yang terfragmentasi dari masyarakat liberal modern, ia juga dapat berkontribusi pada polarisasi sosial dan politik. Dengan menekankan perbedaan antara "kami" versus "mereka" dan dengan mengadopsi pendekatan yang eksklusif terhadap kebenaran religius, gerakan Pentakostal dapat memperdalam garis pembagi dalam masyarakat.⁴¹

Pada akhirnya, Comaroff melihat adanya ontologi dan politik affective dari populisme politik Pentakostalisme. Pentakostalisme menunjukkan pengalaman religius yang sangat emosional dan ekspresif sebagai bukti langsung intervensi ilahi dalam urusan manusia. Ini menantang premis sekularisme liberal dengan menekankan peran langsung Tuhan dalam kehidupan sosial dan politik, serta menawarkan alternatif kepada rasionalitas sekular dengan memprioritaskan pengalaman afektif dan kepastian ontologis.⁴² Tulisan Comaroff menawarkan pandangan yang kaya dan multifaset terhadap bagaimana Pentakostalisme, dengan tekanannya pada afeksi, komunitas, dan penggunaan media, berinteraksi dengan dan membentuk politik populis dalam konteks neoliberal global. Melalui analisis ini, hubungan antara populisme dan politik Pentakostal dilihat sebagai fenomena kompleks yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik kontemporer.

Integrasi dan Strategi Berkelanjutan Pentakostal, Populisme, dan Politik

Dalam konteks integrasi antara Pentakostalisme, populisme, dan politik, maka yang menjadi tujuannya adalah kiprah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan. Universalisme SDGs disandingkan dengan pandangan ke dalam (*inward-looking*) semakin mempengaruhi politik global. Dari sudut pandang Laclau dan Mouffe seperti yang dipaparkan sebelumnya, penting untuk menanggulangi penajaran universalisme dengan universalisme yang sarat nilai nasionalisme demi memahami kaum Pentakostal sebagai satuan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan hegemoni atas "Pembangunan berkelanjutan". Gerakan Pentakostal secara aktif menggunakan strategi komunikasi yang menekankan narasi populis, menggambarkan pemimpin mereka sebagai "orang biasa" yang berlawanan dengan "elite korup". Di Brasil, gerakan ini telah berhasil mengintegrasikan doktrin religius dengan retorika populis untuk mempengaruhi kebijakan publik terkait isu sosial dan ekonomi. Di Nigeria, pengaruh Pentakostal dalam politik termanifestasi dalam dukungan kuat terhadap kandidat yang mendukung nilai-nilai Kristen konservatif. Sementara di Filipina, Pentakostalisme telah berkolaborasi dengan populisme untuk memperkuat dukungan terhadap pemimpin karismatik.

Populisme sering kali berupaya memobilisasi dukungan dengan mengusung isu-isu yang beresonansi secara emosional dengan rakyat, termasuk melalui pemanggilan identitas religius. Dalam beberapa kasus, gerakan Pentakostal dan pemimpinnya dapat terlibat dalam gerakan populis dengan menyediakan dukungan spiritual dan moral untuk agenda politik yang mengklaim mewakili "orang biasa" melawan "elite". Ini sering terjadi dalam konteks di mana ada percepatan ketidakpuasan terhadap *status quo* politik dan ekonomi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, Haustein dan Tomalin menyarankan perlunya upaya yang lebih intensif untuk mengintegrasikan aktor-aktor agama, termasuk komunitas Pentakostal, dalam implementasi SDGs. Aktor-aktor agama memiliki jaringan dan

⁴¹ Comaroff.

⁴² Comaroff.

pengaruh yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan dan sumber daya bagi pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks di mana mereka memiliki pengaruh sosial dan politik yang signifikan.⁴³ Trent Brown menandakan:

Meskipun telah banyak upaya untuk memberikannya sebuah definisi, keberlanjutan tetap merupakan istilah 'kosong' dalam praktik, tidak memiliki isi yang tepat. Kurangnya kepresisian ini tentunya harus menarik kritik, terutama ketika memungkinkan 'gestur kosong' dari para politisi dan pengambil keputusan kunci lainnya. Keluwesan yang datang dengan kurangnya makna tetap dari keberlanjutan pasti telah memungkinkan elit untuk menyajikannya dengan cara yang sesuai dengan agenda mereka sendiri, seperti yang jelas terlihat dengan pendekatan 'pembangunan berkelanjutan'. Namun, kritik seperti itu tidak seharusnya membuat kita buta terhadap potensi keberlanjutan untuk membuka peluang sosial dan politik yang baru.⁴⁴

Lebih lanjut Brown mengusulkan bahwa meskipun sering dipersempit menjadi konsep pembangunan berkelanjutan yang mendukung *status quo*, keberlanjutan sebenarnya memiliki potensi sebagai alat untuk politik radikal yang mengekspresikan kebutuhan akan rekonfigurasi fundamental.⁴⁵ Dalam konteks agama, ini bisa berarti bahwa komunitas kepercayaan dapat menggunakan prinsip keberlanjutan untuk mempertanyakan dan menantang struktur kekuasaan yang ada yang menyebabkan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan, mendorong perubahan sosial yang lebih dalam dan inklusif.

SDGs berusaha menawarkan kerangka kerja alternatif terhadap visi populis yang sempit, yang seringkali didominasi oleh agenda politik nasionalis atau identitas spesifik. Dalam konteks ini, peran Pentakostal dan agama lainnya dalam politik bisa menjadi dua sisi mata uang: di satu sisi, mereka dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan memobilisasi komunitas dan sumber daya untuk tujuan-tujuan sosial; di sisi lain, keterlibatan mereka dalam politik populis bisa memperumit usaha-usaha tersebut jika agenda politik mereka kontradiktif dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan multilateralisme yang menjadi dasar SDGs. Haustein dan Tomalin menunjukkan potensi agama, termasuk komunitas Pentakostal, untuk berkontribusi positif terhadap pencapaian SDGs melalui pengorganisasian komunitas dan advokasi untuk keadilan sosial dan lingkungan.⁴⁶

Brown membahas bagaimana kondisi sosial dan krisis keuangan global telah mengubah prioritas politik dan sosial, menurunkan keberlanjutan sebagai prioritas global. Dalam konteks agama, ini dapat menunjukkan bagaimana krisis dan perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara komunitas kepercayaan memprioritaskan dan bertindak terhadap isu keberlanjutan. Komunitas agama mungkin perlu beradaptasi dan menemukan cara baru untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam praktik dan pengajaran mereka, bahkan ketika menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Brown juga menyoroti pentingnya peranan masyarakat sipil dan pengembangan 'budaya keberlanjutan' yang muncul dari dalam komunitas sebagai lawan dari dikte *top-down* pembangunan berkelanjutan.⁴⁷ Ini menyarankan bahwa komunitas keagamaan bisa memainkan peran penting dalam membangun dan mempromosikan "budaya" keberlanjutan, menggunakan keyakinan dan nilai-nilai mereka untuk menginspirasi tindakan dan komitmen terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan.

⁴³ Haustein and Tomalin, "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals," 301.

⁴⁴ Trent Brown, "Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical Potential," *Antipode* 48, no. 1 (2016): 130, <https://doi.org/10.1111/anti.12164>.

⁴⁵ Brown, 293.

⁴⁶ Haustein and Tomalin, "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals."

⁴⁷ Brown, "Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical Potential."

Kesimpulan

Berlandaskan kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disahkan pada September 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui analisis teori populisme Laclau dan Mouffe, penelitian ini mengeksplorasi peranan aktor-aktor agama, khususnya gerakan Pentakostal, dalam dinamika politik dan sosial yang mendukung atau berpotensi menghambat pencapaian SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya integrasi gerakan agama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai respons terhadap dominasi politik global oleh visi populis yang sempit. Populisme, dengan karakteristiknya yang mampu memobilisasi dukungan melalui isu-isu emosional dan identitas religius, dapat memiliki dampak ganda: di satu sisi, ia mampu memfasilitasi partisipasi komunitas dalam pembangunan berkelanjutan; di sisi lain, dapat menimbulkan konflik dengan prinsip inklusivitas dan multilateralisme yang ditekankan oleh SDGs. Dalam konteks Pentakostal, penelitian ini membedah bagaimana spiritualitas dan praktik sosial-politik gerakan ini berinteraksi dengan fenomena populisme dan politik. Pentakostalisme, dengan fokus awalnya pada transformasi individu dan pemberdayaan melalui Roh Kudus, secara bertahap mengakui perlunya keterlibatan dalam isu-isu sosial dan politik. Ini mencakup kebutuhan untuk mengatasi bahaya yang menyertai interpretasi subjektif dan emosional Alkitab, serta risiko teologi kemakmuran yang mengalihkan perhatian dari aspek penting lainnya dari ajaran agama.

Peran media dan teknologi dalam mendukung populisme Pentakostal, yang berpotensi baik mendalaman partisipasi komunitas dalam kehidupan sosial-politik maupun memperkuat polarisasi dalam masyarakat. Integrasi antara Pentakostalisme, politik, dan populisme diidentifikasi sebagai sarana potensial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meski memerlukan keseimbangan cermat untuk memastikan bahwa keterlibatan agama tidak mengganggu prinsip-prinsip utama SDGs. Peneliti menyarankan perlunya upaya lebih intensif untuk mengintegrasikan komunitas agama, khususnya Pentakostal, dalam usaha pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk pemanfaatan jaringan dan pengaruh mereka untuk mendukung SDGs, sekaligus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi global. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun 'budaya keberlanjutan' dari dalam komunitas, dimana komunitas agama dapat memainkan peran kunci dalam mempromosikan nilai dan praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Adon, Mathias Jebaru. "Melawan Populisme dengan Semangat Pancasila Sebagai Dasar Persatuan dan Kesatuan Bangsa." *Jurnal Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, 2021.
- Anderson, Allan Heaton. "Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development." *Spiritus* 5, no. 1 (2020): 121–36.
- — —. "The Emergence of a Multidimensional Global Missionary Movement: A Historical Review." In *Pentecostal Mission and Global Christianity*, edited by Wonsuk Ma, Veli-Matti Kärkkäinen, and J. Kwabena Asamoah-Gyadu, 10–25. Oxford: Regnum Books International, 2014.
- Brown, Trent. "Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical Potential." *Antipode* 48, no. 1 (2016): 115–33. <https://doi.org/10.1111/anti.12164>.
- Comaroff, Jean. *Pentecostalism, Populism and the Politics of Affect: In Africa and Elsewhere*. Edited by Dena Freeman. *Pentecostalism and Development*. Palgrave Macmillan, 2012. <https://doi.org/10.1057/9781137017253>.
- Duncan, Kent. "Emerging Engagement: The Growing Social Conscience of Pentecostalism." *Encounter: Journal for Pentecostal Ministry* 7 (2010).

- Flowe, J. Roswell. "Pentecostal Commission." *Pentecostal Evangel*, June 1920.
- Fontana, Leandro L.B. "Introduction." In *Political Pentacostalism: Four Synoptic Survey from Asia, Africa, and America Latin*, edited by Leandro L.B. Fontana and Markus Lubert, 9–24. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2021.
- Fontana, Leandro L.B., and Markus Lubert, eds. *Political Pentacostalism: Four Synoptic Survey from Asia, Africa, and America Latin*. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2021.
- Freestone, Paul. "Pentecostals and Politics in Latin America." In *Pentecostalism and Politics*, 2006.
- Freston, Paul. "Pentecostalism and Global Politics: Three Questionable Approaches." *Institute of Culture, Religion and World Affairs*, 2014, 1–4.
- Haight, Roger. "The Mission of the Church in the Theology of the Social Gospel." *Theological Studies* 49, no. 3 (1988): 477–497.
- Hasiholan, Anggi Maringan. "Misi yang Ramah dan Estetis: Rekonstruksi Misiologi Pentakostal Melalui Perspektif Hospitalitas dan Teopoetik." *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 882–98. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1109>.
- — —. "Spiritualitas dan Teologi Sosial Pentakostal Asia." *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–77.
- Haustein, Jörg, and Emma Tomalin. "Religion, Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals." *Social Policy and Society* 20, no. 2 (2021): 296–309. <https://doi.org/10.1017/S147474642000072X>.
- Herianto, Hubertus, and Robertus Wijanarko. "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 53–64.
- Idahosa, B. *I Choose to Change*. Crowborough: Highland, 1987.
- Kärkkäinen, Veli-Matti. "The Pentecostal Understanding of Mission." In *Pentecostal Mission and Global Christianity*, edited by Wonsuk Ma, Veli-Matti Kärkkäinen, and J. Kwabena Asamoah-Gyadu, 26–44. Oxford: Regnum Books International, 2014.
- Laclau, E., and C. Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso, 1987.
- Miller, Donald E., and Tetsunao Yamamori. *Pentecostalism Global: The New Face of Christian Social Engagement*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2016.
- Pakpahan, Gernaida Krisna R. "Pentecostal Spiritual Formation: The Passion of Social for Humanity in Society 5.0 Era." In *Iconthee 2022*, 2022:144–54. Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-160-9_17.
- Pranoto, Minggus M. "Discerning the Spirit (s) Dalam Kuasa Politik: Sebuah Perspektif Teologi Pentakostal." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 3, no. 1 (2019): 1–16.
- Smith, David L. *A Handbook of Contemporary Theology*. Michigan: Bridge Point Books, 1998.
- Supatra, Hendarto. "Mengenal Pentakostalisme di Indonesia." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja* 3, no. 2 (2019): 11–24. <https://doi.org/10.37368/ja.v3i2.97>.
- Vlas, Natalia, and Simona Sav. "Pentecostalism and Politics." *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 13, no. 37 (2014): 148–77.
- Welak, Feridus. "Populisme di Indonesia: Ancaman Bagi Integritas Masyarakat dan Reaktualisasi Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 62–70.
- Widjaja, Fransiskus Irwan, Harls Evan R. Siahaan, and Nathanael Octavianus. "Partisipasi Sosial-Politik Sebagai Praktik Hospitalitas Kaum Pentakostal." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 378–96. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.633>.
- Wijanarko, Robertus. "Religious Populism and Public Sphere in Indonesia." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 2021.

Woodbridge, Michael. "From MDGs to SDGs: What Are the Sustainable Development Goals?" *ICLEI BRIEFING SHEET - Urban Issues* 1, no. 1 (2015): 4.
<https://www.local2030.org/library/251/From-MDGs-to-SDGs-What-are-the-Sustainable-Development-Goals.pdf>.